

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (STUDI KASUS KELURAHAN BATU AMPAR)

Syahdan Ali Dante²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang tingkat Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Batu Ampar tahun 2021. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penyajian deskriptif. Fokus penelitian adalah 5 (lima) aspek yang menjadi indikator efektivitas kebijakan program BPNT yaitu aspek tepat sasaran, aspek tepat waktu, aspek tepat jumlah, aspek tepat kualitas, dan aspek tepat guna. Selain itu, penelitian ini juga memberi perhatian pada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program BPNT. Efektivitas kebijakan didefinisikan sebagai tingkat ketepatan lima aspek yang diamati dengan kriteria semakin tinggi tingkat ketepatan lima aspek tersebut dalam pelaksanaan semakin efektif kebijakan pelaksanaannya. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan perekaman, dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan dua kelompok responden sebagai sumber utama data yaitu pejabat Kelurahan Batu Ampar sebagai petugas pelaksana program BPNT dan masyarakat penerima BPNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima aspek tepat yang menjadi fokus penelitian, empat aspek memenuhi kriteria efektivitas tinggi karena diakui dan dibenarkan baik oleh pemerintah sebagai pelaksana program maupun oleh masyarakat sebagai penerima manfaat program BPNT. Empat aspek tersebut yaitu aspek tepat sasaran, aspek tepat jumlah, aspek tepat kualitas, dan aspek tepat guna. Satu aspek lainnya yang tingkat efektivitasnya tidak maksimal dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat kendala tertentu yaitu aspek tepat waktu. Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana tersebut di atas penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Batu Ampar tahun 2021 termasuk dalam kategori baik. Terdapat tiga faktor Pendukung efektivitas kebijakan BPNT di Kelurahan Batu Ampar yaitu kerjasama dan koordinasi yang baik instansi pemerintah sebagai pelaksana program, transparansi informasi, dan peran aktif serta fasilitatif mitra perbankan dan agen penyalur. Kendala yang ditemukan adalah masih terjadinya gangguan teknis distribusi bantuan dari mitra penyalur ke masyarakat penerima.

Kata Kunci: Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Guna

Pendahuluan

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang yang ada di Benua Asia, Negara Republik Indonesia berupaya untuk meningkatkan diri dan mengembangkan berbagai macam aspek kehidupan di dalamnya. Menghadapi dunia persaingan global

tentunya semakin membuat semua aspek bisa segera diperbaiki dan di *upgrade*, agar bisa mempunyai daya saing dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Negara berkembang bisa diberikan makna sebagai Negara *underdevelop/backword* (terbelakang dan miskin). Negara berkembang ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan Negara-negara maju. Beberapa ciri dari negara berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang rendah
- b. Standar kehidupan yang masih rendah.
- c. Rendahnya produktivitas masyarakat
- d. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi.
- e. Angka ketergantungan pada pihak asing dan pengangguran tinggi.
- f. Mayoritas penduduk bergantung pada sektor produk primer dan pertanian.
- g. Lemah dalam aspek hubungan internasional.
- h. Minimnya modal yang digunakan untuk pembangunan.
- i. Ketersediaan lahan kerja dan tenaga kerja yang tidak seimbang.
- j. Penerapan teknologi yang tidak cocok dengan situasi dan kondisi, dan lain-lain.

Pembangunan di bidang ekonomi adalah pondasi utama agar bisa melaju ke level yang lebih tinggi, peningkatan kemampuan dan kemakmuran masyarakat menjadi hulu yang diutamakan untuk dibenahi terlebih dahulu. *United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD)*, menyatakan bahwa suatu Negara berkembang dapat disebut berhasil dalam pembangunannya bila Negara tersebut mengalami pertumbuhan dalam berbagai sektor antara lain: (i) tingkat harapan hidup; (ii) konsumsi protein hewani; (iii) persentase anak-anak belajar di SD dan SMP, (iv) persentase anak-anak belajar di kejuruan, (v) jumlah surat kabar; (vi) jumlah telepon dan radio, (vii) persentase penduduk yang diam di kota, (viii) persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian, (ix) Persentase angkatan kerja di bidang jasa dan industri; dan (x) konsumsi listrik dan energi per kapita.

Berbagai program disiapkan dan diimplementasikan, untuk membantu kemampuan dan daya beli masyarakat, dari mulai tingkat provinsi hingga ke wilayah. Salah satunya program tersebut adalah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menggantikan Program Raskin yang dicanangkan sebelumnya, yang merupakan program dari pemerintah dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui program ini mengacu kepada 4 (empat) prinsip umum, yaitu (i) mudah dijangkau, (ii) memberikan banyak pilihan kepada Keluarga Penerima Manfaat, (iii) mendorong usaha retail memperoleh pelanggan, (iv) memberi akses jasa keuangan pengusaha retail dan Keluarga Penerima Manfaat.

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh program ini adalah :

- a. Meningkatkan ketahanan pangan ditingkat keluarga penerima manfaat.
- b. Meningkatkan transaksi non tunai,
- c. Meningkatkan akses masyarakat kepada layanan keuangan,
- d. Efisiensi penyaluran,
- e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kalimantan Timur yang merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia, menjalankan program tersebut di wilayahnya. Dalam pelaksanaannya tentu belum berjalan sempurna, beberapa kendala teknis juga dihadapi antara lain adalah permasalahan data yang masih perlu di atasi dengan cara melakukan verifikasi dan validasi agar bantuan ini tepat sasaran, demikian salah satu rekomendasi dari Rapat Evaluasi BPNT Provinsi Kalimantan Timur 2019.

Ketepatan dan Kecepatan penyaluran merupakan salah satu hal yang masih jadi kendala dilapangan, jangan sampai tujuan mulia yang ingin mensejahterakan kehidupan para penerima Manfaat menjadi simpang siur dan berantakan. Dan pada akhirnya adalah bagaimana kebijakan ini akan membantu meningkatkan perekonomian daerah pada khususnya, dan perekonomian negara pada akhirnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah dengan menetapkan judul penelitian : “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Kelurahan Batu Ampar).”

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dalam hal ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana tingkat efektivitas kebijakan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Batu Ampar?

Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan mengenai kebijakan pemerintah dalam hal pemberian bantuan baik bantuan tunai maupun bantuan non tunai kepadama masyarakat melaporkan hasil yang bervariasi.

Penelitian Benny Rachman, Adang Agustiawan dan Wahyudi (2018) dengan judul “Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non Tunai” mengukur tingkat keektifitas pelaksanaan program Rastra dan BPNT berdasarkan 6 aspek pengamatan yang dalam penelitian tersebut disebut dengan aspek 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, Tepat Harga dan Tepat Kualitas). Hasilnya menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan program bervariasi antara satu aspek dengan aspek lainnya.

Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Gustiance dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustanaible Developmnet Goals/SDGS) di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai BPNT berdasarkan tujuan program belum terlaksana secara optimal karena terjadi peningkatan masalah saldo nol dan permasalahan teknis pelaksanaan tidak sesuai. Selain dari hal tersebut di atas, aspek efektivitas tujuan juga masih kurang baik, efisiensi waktu penyaluran dan jumlah ewarong yang belum baik, responsivitas permasalahan lambat, dan penerima bantuan pangan non tunai yang belum merata.

Sazime Arief (2017) mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Maharatu Kota Pekanbaru melaporkan bahwa dalam pelaksanaan program Raskin terdapat penyimpangan, hal ini terlihat dari waktu penyaluran Raskin yang tidak dilaksanakan setiap bulannya. Dari sisi kuantitas bantuan raskin, juga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah jatah raskin yang seyogyanya diterima oleh masyarakat (25 Kg) dengan kenyataan di lapangan dimana setiap RTM menerima hanya 5-10 Kg beras pada setiap periode penyaluran. Penelitian juga menemukan bahwa anggaran yang tersedia dalam penyaluran raskin tidak maksimal serta masih adanya indikasi nepotisme di dalam pendataan RTM sebagai penerima raskin, sehingga

terdapat warga yang tidak dapat menerima bantuan raskin karena tidak memiliki identitas sebagai warga Kelurahan Maharatu.

Hasil-hasil penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan adanya beberapa kesamaan diantaranya dalam pembahasan, yaitu membahas tentang evaluasi pelaksanaan dari suatu program, evaluasi BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menangani kemiskinan.” Akan tetapi, sejauh ini belum ditemukannya penelitian serupa mengenai efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Oleh karena itu, penelitian ini didesain untuk mengetahui efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai, dengan melakukan studi kasus pada Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono 2018) dengan metode pemerian deskriptif berdasarkan data factual hasil pengamatan yang diperoleh dari lapangan terhadap obyek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap efektifitas pelaksanaan program BPNT dengan memusatkan perhatian pada 5 aspek pengamatan yang ditetapkan sebagai indikator efektifitas program yaitu (i) aspek tepat sasaran, (ii) aspek tepat waktu, (iii) aspek tepat jumlah, (iv) aspek tepat kualitas, dan (v) aspek tepat guna. Kriteria penilaian efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat kesesuaian antara apa yang diprogramkan dalam 5 aspek tersebut dengan apa yang terealisasi dalam pelaksanaannya maka semakin tinggi tingkat efektivitas kebijakan tersebut. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kesesuaian antara rencana dengan realisasi program dalam 5 aspek tersebut, maka semakin rendah tingkat efektivitas kebijakannya.

Data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dengan informan yang terkiat dengan Program BPNT di Kelurahan Batu Ampar. Informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas dua kluster yaitu kluster pemerintah sebagai penyelenggara program dan kluster masyarakat sebagai sasaran dan penerima bantuan. Data sekunder diperoleh dari catatan-catatan penting dari instansi pemerintah tentang program BPNT. Data-data tersebut bersi dari Badan Pusat Statistik (BPS), internet, artikel, jurnal dan sumber lainnya mendukung keberlangsungan Program BPNT.

Terhadap data yang diperoleh, dilakukan analisis dengan menggunakan model analisis yang diprakarsai Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:92) yaitu Analisis Data Model Interaktif (*Interactive Model Of Analisis*).

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan penyaluran BPNT di Kelurahan Batu Ampar Kota Balikpapan dikoordinasikan Dinas Sosial Kota Balikpapan dengan melibatkan perangkat pemerintah di tingkat kelurahan, para Ketua Rukun Tetangga (RT), unsur perbankan yaitu Bank BRI, dan pelaku usaha setempat yaitu Toko Gloria yang menjadi penyedia barang/bantuan..

Efektivitas penyaluran BPNT yang sekaligus menjadi gambaran tingkat efektivitas kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program BPNT pada dasarnya dapat diketahui melalui pengamatan terhadap beberapa aspek. Dalam penelitian ini, ditetapkan 5 (lima) aspek yang menjadi fokus pengamatan untuk menentukan tingkat efektivitas kebijakan pelaksanaan program BPNT di wilayah Kota Balikpapan,

khususnya wilayah Kelurahan Batu Ampar. Lima aspek tersebut adalah sebagai berikut: (i) tepat sasaran, (ii) tepat waktu, (iii) tepat jumlah, (iv) tepat kualitas, dan (v) tepat guna (bermanfaat bagi penerima). Kriteria efektivitas yang digunakan yaitu: semakin tinggi tingkat kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan apa yang terrealisasi dalam masing-masing dari lima aspek tersebut maka semakin tinggi efektivitas pelaksanaan program. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan apa yang terrealisasi dalam masing-masing dari lima aspek tersebut maka semakin rendah efektivitas pelaksanaan program.

Aspek Tepat Sasaran

Aspek pertama yang diamati dalam menilai efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Batu Ampar Kota Balikpapan adalah seberapa tepat BPNT tersebut ditinjau dari aspek sasaran penerima bantuan. Untuk menganalisis aspek tepat sasaran tersebut, diperlukan data mengenai kriteria calon penerima BPNT yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai regulator serta data tentang masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima BPNT pada pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Batu Ampar tahun 2021. Kedua data tersebut disandingkan dan dibandingkan untuk melihat kesuaiannya dengan kriteria bila kedua data sesuai maka BPNT dinilai tepat sasaran; demikian pula sebaliknya bila tidak sesuai maka BPNT dinilai tidak tepat sasaran.

Dari pengumpulan data melalui wawancara dengan pejabat pemerintah dalam hal ini pejabat pemerintah Kelurahan Batu Ampar serta Ketua Rukun Terangga tentang kriteria penerima BPNT diperoleh data bahwa masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai kelompok sasaran serta boleh diusulkan sebagai calon penerima BPNT pada dasarnya adalah kelompok masyarakat miskin atau sangat miskin sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan rumah tangga mereka. Hal tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam wawancara antara lain dengan Kasi Pemerintahan Kelurahan Batu Ampar yang menyatakan sebagai berikut:

“Orang-orang yang tidak mampu maksudnya dalam arti kata tidak mampu untuk menghidupi kehidupannya ... misalkan untuk contoh membeli pakaian setahun sekali ... tidak bisa setahun berapa kali ... untuk makan juga kadang-kadang mereka bisa makan kadang-kadang tidak”

Data kedua, yaitu data tentang masyarakat yang menjadi sasaran penerima BPNT dalam pelaksanaan Program BPNT tahun 2021 di Kelurahan Batu Ampar dianalisis kesuaiannya dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas. Dalam melakukan analisis kesesuaian, ada dua hal yang dilakukan yaitu pertama mencermati proses seleksi dan penentuan Kepala Keluarga penerima bantuan dan kedua melakukan pembuktian secara langsung kondisi keluarga penerima bantuan dengan melakukan kunjungan ke rumahnya untuk melakukan wawancara.

Dari segi proses seleksi dan penentuan Kepala Keluarga penerima BPNT, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara kriteria penerima uang ditetapkan dengan proses seleksi yang dilakukan. Data yang diperoleh dari Pemerintah Kelurahan Batu Ampar beserta Ketua RT menunjukkan bahwa proses seleksi telah dilaksanakan dengan cermat untuk menjamin terpenuhinya kriteria tersebut. Seleksi dan penentuan sasaran (calon penerima) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT dimana Ketua RT menyeleksi nama-nama Kepala Keluarga di lingkungan RT masing-masing yang dinilai layak untuk diusulkan ke tingkat Kelurahan. Data usulan calon penerima BPNT dari seluruh RT di lingkungan kelurahan Batu Ampar selanjutnya diusulkan oleh Kelurahan ke Dinas Sosial Kota Balikpapan. Sebelum penentuan akhir nama-nama Kepala Keluarga penerima BPNT, pejabat kelurahan bersama dengan pejabat dinas sosial melakukan kunjungan ke rumah calon penerima yang diusulkan oleh RT untuk memastikan kebenaran datanya.

Dari segi pembuktian secara langsung, dari hasil kunjungan peneliti ke rumah penerima bantuan diketahui bahwa kondisi kehidupan keluarga penerima bantuan dalam pelaksanaan Program BPNT tahun 2021 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah sehingga bantuan yang diberikan memenuhi aspek tepat sasaran.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kesesuaian data mengenai kriteria penerima yang ditetapkan oleh pemerintah dengan data mengenai masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek tepat sasaran, efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Program BNNT di Kelurahan Batu Ampar tahun 2021 telah berjalan dengan baik.

Aspek Tepat Waktu

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa pelaksanaan pendistribusian bantuan dari pemerintah kepada target penerima bantuan dalam Program BNPT dijadwalkan satu kali satu bulan.

Sebagaimana telah ditentukan di awal oleh pemerintah bahwa bantuan didistribusikan kepada masyarakat penerima satu kali dalam sebulan maka masyarakat penerima bantuan harus mengambil bantuan pada tempat yang sudah ditentukan setiap bulannya. Untuk pelaksanaan di Kelurahan Batu Ampar, para penerima akan diberikan informasi apabila bantuan sudah dapat diambil di toko penyalur yang telah ditunjuk pihak penyelenggara yaitu Toko Gloria. Penerima bisa melakukan pengambilan bantuan setiap bulan. Dalam keadaan tertentu dengan alasan yang dapat diterima oleh penyelenggara, pengambilan dapat dilakukan oleh penerima per tiga bulan sekali. Bagi para penerima yang tidak rutin mengambil bantuan setiap bulan, maka mereka harus melaporkan apa masalahnya, karena apabila dalam tiga bulan penerima tidak memberi alasan mengapa mereka tidak mengambil bantuan, maka oleh kementerian sosial mereka dinilai sudah mampu dan secara otomatis dianggap mengundurkan diri dari sebagai penerima program BPNT sehingga tidak lagi berhak mendapatkan bantuan pada tahun berjalan. Kasi Pemerintahan Kelurahan Batu Ampar menjelaskan hal itu yang turut dibenarkan pula oleh Ketua RT 50 dan Ketua RT 57 Kelurahan Batu Ampar serta oleh masyarakat penerima bantuan.

“BPNT Setiap bulan ... tapi kalau dalam waktu 3 bulan mereka tidak mengambil dianggap sama kemensos mereka mampu ... ya jadi mereka harus mengambil setiap bulan .. tidak boleh tidak diambil. Dalam waktu 3 bulan .. 105 hari lah maksimal mereka tidak mengambil, mereka dianggap mampu oleh kemensos” (Data wawancara Kasi Pemerintahan Kelurahan Batu Ampar)

“Setiap bulan tanggal 5 ... tapi tidak nentu juga tinggal menunggu info diberitahukan dari kelurahan ... ditembusi ke RT ... sebulan sekali ... tergantung juga di kelurahan” (Data Wawancara Ketua RT 57 Batu Ampar).”

Proses atau jalur distribusi pelaksanaan program BPNT ini dimulai dari seleksi data penerima, para penerima yang lolos dari seleksi diwajibkan untuk membuka rekening bank. Adapun pihak bank yang ditunjuk oleh pemerintah adalah Bank BRI. Selain memiliki rekening pada Bank BRI, para penerima juga mendapatkan kartu identitas sebagai penerima program BPNT. Kartu inilah yang akan digunakan sebagai alat tukar pada toko penyalur yang dijadikan rekanan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini di Toko Gloria.

Mengenai teknis pendistribusian ini, baik penerima maupun pemerintah memberikan penjelasan yang intinya sama dan saling bersesuaian. Berikut adalah data teknis distribusi bantuan yang dilejaskan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Batu Ampar yang juga dibenarkan oleh para Ketua RT dan masyarakat penerima bantuan.

“Kalau pendistribusiannya itu kemensos bekerjasama dengan BRI, ya ... itu pendistribusian kartunya dulu. Setelah ada kartu setelah mereka dapat kartu ... kita di sini punya toko Gloria atau BRILink langsung ambil ke toko ... bukan kelurahan yang memberikan mereka langsung”

Secara umum jalur dan mata rantai distribusi bantuan tergolong pendek dan sederhana karena bantuan didistribusikan oleh pemerintah pusat langsung ke rekanan (toko) penyalur dan dari penyalur langsung ke masyarakat penerima. Hal ini sangat tepat dalam meminimalkan munculnya masalah akibat dari panjangnya jalur dan mata rantai distribusi. Mulai dari penyediaan suplai bahan bantuan di tingkat pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Sosial sampai kepada pemerintah daerah, bank Mitra dan mitra local sebagai penyalur semuanya telah terkoordinasi dengan baik.

Namun demikian, data pelaksanaan distribusi bantuan program BPNT tahun 2021 di Kelurahan Batu Ampar menunjukkan bahwa keterlambatan distribusi juga sempat terjadi. Keterlambatan tersebut terjadi bukan akibat kendala teknis distribusi melainkan karena suplai bahan bantuan di tingkat pemerintah pusat belum tersedia pada waktu yang ditentukan. Kondisi seperti itu terjadi lebih disebabkan oleh koordinasi di tingkat pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial yang tentu saja tidak sederhana karena mengoordinasikan dan menyediakan suplai bahan bantuan untuk begitu banyak kelurahan di seluruh wilayah NKRI. Sebagai akibatnya, masyarakat penerima termasuk penerima di Kelurahan Batu Ampar terlambat menerima bantuan dan harus menunggu. Bantuan yang menurut Ketua RT 57 semestinya sudah diterima pada awal bulan menjadi tertunda pada bulan berikutnya, sementara bantuan sudah diperlukan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Keterlambatan tersebut dibenarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Batu Ampar namun masyarakat penerima tetap memperoleh semua haknya yang belum diambil pada saat pengambilan bulan berikutnya.

“Alhamdulillah untuk Batu Ampar tidak ada kendala ... mereka semua mendapatkan lancar dari toko ... kecuali ... terkecuali toko Gloria bisa kehabisan bahan karena belum adanya suplai dari pusat ... ya bisa kehabisan bahan karena belum adanya ... apa... ini pengiriman dari pusat... seperti pernah 3 bulan yang kemarin mereka ngambil tidak ada bu masih kosong ... tapi setelah itu lancar. Kalau sudah turun dari pusat langsung dikasi 3 bulan sekaligus ... jadi dirapel”

Data tentang keterlambatan distribusi seperti dijelaskan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BPNT tahun 2021 di kelurahan Batu Ampar telah mengalami gangguan yang mengakibatkan berkurangnya efektivitas kebijakan pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Batu Ampar ditinjau dari aspek tepat waktu.

Aspek Tepat Jumlah Bantuan

Jumlah bantuan yang diterima per bulan oleh para penerima yaitu setara dengan uang tunai Rp. 200.000. Dengan kata lain, para penerima dianggap memiliki saldo tunai sebesar Rp. 200.000 pada kartu bantuan masing-masing sehingga apabila penerima ingin mencairkan bantuan tersebut mereka tinggal menyerahkan kartunya kepada pihak toko. Untuk barang yang dapat diperoleh dengan menunjukkan kartu tersebut pada toko penyalur, menurut Ketua RT 50 dan Ketua RT 57 serta masyarakat penerima dapat berupa beras, minyak goreng, telur dan beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya. Pada umumnya para penerima memilih beras, telur dan juga minyak goreng sebagai bantuan yang mereka terima. Ibu Jumiati (61 tahun), Ibu Patemi (60 tahun), dan Ibu Aisyah (63 tahun) menyatakan setiap kali pengambilan bantuan di toko, mereka bertiga selalu mengambil beras 5 kg, telur 30 butir, dan keperluan rumah tangga lainnya.

Efektivitas pelaksanaan program BPNT selanjutnya adalah Tepat Jumlah. Seperti Ibu Jumiati dan juga Ibu Aisyah yang telah diwawancarai, mereka berdua

memilih menukarkan beras dan telur setiap mereka mengambil BPNT. Untuk beras, mereka mengambil sebanyak 5 kg dan telur sejumlah satu piring atau tiga puluh butir. Apabila diuangkan, maka jumlah yang mereka terima sesuai dengan nominal yang mereka terima setiap bulan yaitu Rp. 200.000. Maka dapat dikatakan untuk hal efektivitas dibidang Tepat Jumlah telah terpenuhi.

Beberapa warga lainnya yang juga sebagai penerima program BPNT di Kelurahan Batu Ampar, menurut Ketua RT 50, juga mengambil ikan dan bahan sayuran: “Yang saya lihat dari warga saya itu ada yang ngambil beras, telur ... limit belanja 200 ribu, mereka bebas memilih untuk ... menerima bantuan ini yang berupa telur, beras, ikan, sayur” (Data Wawancara Ketua RT 50). Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua RT 57: “...beras, telur, minyak goreng sejumlah 200 ribu per bulan, mereka bebas aja ... ada yang milih telur, beras, ikan, bahan sayur ... terserah mereka pilih apa kebutuhannya.

Maksud dari Tepat Jumlah disini yaitu bantuan non tunai yang diperoleh dan barang yang ditukar sesuai nilainya, oleh karena itu maka para penerima juga dapat memeriksa berapa jumlah dana yang tersedia di kartu penerima. Agar para penerima bisa mendapatkan bantuan apa yang mereka ingin tukarkan, biasanya pihak toko juga mencari tahu apa saja barang-barang yang sering ditukarkan oleh para penerima bantuan agar pendistribusian bantuan kepada para penerima dapat dilakukan dengan baik dan sesuai.

Berdasarkan data jumlah bantuan yang diterima sebagaimana dijelaskan di atas diketahui bahwa aspek tepat jumlah telah terpenuhi dalam pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Batu Ampar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Batu Ampar tahun 2021 ditinjau dari aspek tepat jumlah telah berjalan dengan baik.

Aspek Tepat Kualitas Bantuan

Aspek selanjutnya yang menjadi perhatian dalam penentuan efektivitas kebijakan pelaksanaan Program BPNT adalah aspek tepat kualitas. Dalam menilai aspek tepat kualitas, penelitian ini membandingkan data kualitas barang, dalam hal ini merek atau jenis barang bantuan, yang ditetapkan oleh pemerintah dengan data kualitas (merek/jenis) barang yang secara nyata diterima oleh masyarakat penerima bantuan dari toko penyalur. Efektivitas pelaksanaan program BPNT dari aspek tepat kualitas ditentukan dengan menggunakan kriteria bahwa apabila terdapat kesesuaian antara merek/jenis barang yang dijanjikan oleh pemerintah dengan merek/jenis barang yang diterima oleh masyarakat, maka pelaksanaan program BPNT berjalan efektif. Apabila sebaliknya, maka pelaksanaan program BPNT tidak efektif.

Bantuan yang diberikan umumnya berupa bahan makanan, pemerintah menentukan kualitas/merek hanya untuk satu jenis bantuan yaitu beras dengan merek Mawar sementara untuk jenis bantuan lainnya tidak ditentukan mereknya mengingat tidak ada merek yang standar untuk bahan seperti telur, sayur, dan ikan segar. Oleh karena tidak terdapat merek yang dapat dijadikan rujukan dalam menentukan aspek tepat kualitas untuk bahan seperti telur, sayur, ikan dan lainnya, maka digunakan kriteria tambahan yaitu tingkat kepuasan penerima terhadap bahan bantuan yang diterima. Apabila masyarakat penerima bantuan merasa puas dengan bahan bantuan yang diterima maka bantuan dinilai memenuhi aspek tepat kualitas, sebaliknya apabila tidak puas maka bantuan dinilai tidak memenuhi aspek tepat kualitas.

Untuk hal kualitas, pemerintah telah menetapkan merek yang akan diberikan kepada para penerima agar para penerima juga tahu apa yang akan mereka terima agar tidak terjadi praktek penyalahgunaan distribusi. Pihak toko penyalur juga diberi tahu oleh pihak penyelenggara agar jujur dalam pendistribusian bantuan. Hal ini dilakukan

oleh penyelenggara supaya pihak toko memberikan bantuan kepada penerima sesuai dengan merek yang ditentukan oleh penyelenggara.

Walaupun bersifat bantuan, pemerintah selaku pihak penyelenggara menetapkan merek Mawar sebagai beras yang akan diberikan kepada para penerima bantuan. Beras merek Mawar termasuk kategori beras yang berada di atas rata-rata dalam segi harga dan juga kualitas. Penetapan merek ini dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk menjaga kualitas dari program BPNT, walaupun bantuan, tapi pemerintah tidak sembarangan dalam memberikan bantuan supaya para penerima juga dapat merasakan bantuan yang berkualitas.

Untuk pelaksanaan di Kelurahan Batu Ampar, berdasarkan data hasil wawancara diketahui bahwa baik Pemerintah Kelurahan Batu Ampar, Ketua RT, maupun masyarakat penerima bantuan semuanya mengonfirmasi bahwa beras yang digunakan dalam Program BPNT di Kelurahan Batu Ampar tahun 2021 adalah benar beras dengan merek Mawar. Dengan kata lain, terdapat kesesuaian antara kualitas beras yang dijanjikan dengan kualitas beras yang secara nyata diterima oleh masyarakat penerima. Adapun mengenai bahan bantuan selain beras, data hasil wawancara dengan Pemerintah Kelurahan Batu Ampar dan Ketua RT menunjukkan bahwa mereka menilai masyarakat penerima bantuan puas dengan kualitas bahan bantuan yang mereka terima. Di sisi lain, data hasil wawancara dengan masyarakat penerima mengenai kualitas bahan bantuan yang mereka terima menunjukkan bahwa masyarakat penerima bantuan puas dengan kualitas bahan bantuan yang mereka terima.

“Mereka...alhamdulillah mereka puas...bagi yang mendapatkan BPNT” ya ...”

(Kasi pemerintahan)

“Ya, alhamdulillah puas dengan adanya itu ...” (Ketua RT 57)

”Sangat puas” (Ibu Jumiati 61 tahun)

“Sangat puas” (Ibu Patemi 60 tahun)

”Ya, alhamdulillah sangat puas ...” (Ibu Aisyah 63 tahun)

Berdasarkan hasil analisis atas data yang diperoleh tentang kesesuaian antara kualitas bantuan yang dijanjikan dengan kualitas bantuan yang diterima dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek tepat kualitas, efektivitas kebijakan dan pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Batu Ampar tahun 2021 telah tercapai dengan baik.

Aspek Tepat Guna

Program BPNT dilaksanakan oleh pemerintah tentunya dimaksudkan agar dapat membantu kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Oleh karena itu maka sasaran bantuan dalam program BPNT adalah kelompok masyarakat miskin atau sangat miskin yang terdapat pada masing-masing kelurahan.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan program BPNT maka salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah aspek tepat guna. Seberapa besar bantuan yang diberikan melalui program BPNT telah bermanfaat dalam membantu meringankan beban kehidupan masyarakat penerima bantuan. Bantuan dinilai tepat guna apabila penerima bantuan merasakan manfaat atau merasa terbantu dengan adanya bantuan yang diterima.

Untuk memperoleh data mengenai manfaat bantuan bagi penerima bantuan, dilakukan wawancara baik dengan pemerintah kelurahan Batu Ampar beserta Ketua RT nya maupun dengan masyarakat penerima bantuan. Melalui wawancara, pihak pemerintah kelurahan dan Ketua RT diminta untuk memberi penilaian menurut persepsi mereka apakah masyarakat penerima bantuan merasa terbantu dan apakah merasa puas dengan bantuan yang mereka terima. Di pihak lain masyarakat penerima

bantuan diminta menjawab pertanyaan apakah mereka merasa terbantu dan merasa puas atau senang dengan bantuan yang mereka terima.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan program BPNT memenuhi aspek tepat guna, jawaban dari pemerintah kelurahan dan Ketua RT tentang penilaian mereka terhadap kemanfaatan bantuan dan kepuasan masyarakat dianalisis tingkat kesesuaiannya dengan jawaban dari masyarakat penerima bantuan. Kriteria yang digunakan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Batu Ampar adalah apabila penilaian pemerintah kelurahan dan ketua RT tentang kemanfaatan dan kepuasan masyarakat terdapat kesesuaian dengan apa yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan, maka program BPNT dinilai memenuhi aspek tepat guna. Demikian pula sebaliknya, apabila penilaian pemerintah kelurahan dan ketua RT tentang kemanfaatan bantuan dan kepuasan masyarakat tidak terdapat kesesuaian dengan apa yang secara nyata dirasakan masyarakat penerima bantuan, maka program BPNT dinilai tidak memenuhi aspek tepat guna.

Data hasil wawancara dengan pemerintah kelurahan dan ketua RT menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan dan ketua RT menilai masyarakat penerima bantuan di Kelurahan Batu Ampar merasakan manfaat dan merasa sangat terbantu dengan adanya program BPNT tersebut sebagaimana data wawancara berikut:

“... bagi yang mendapatkan BPNT ya .. mereka terbantu dengan adanya BPNT terutama utk masalah kehidupan mereka ...” (Kasi Pemerintahan).

“Jelas mas, ini sangat membantu sekali ... menopang perekonominya lah ... berdampak sekali” (Ketua RT 50).

“Ya Alhamdulillah Puas dengan adanya itu karena dia terbantu dengan adanya bantuan tersebut” (Ketua RT 57).

Di pihak lain, masyarakat penerima bantuan ketika ditanya apakah bantuan yang mereka terima melalui program BPNT bermanfaat bagi mereka, mereka semuanya menjawab bermanfaat dan merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Hal itu diketahui dari data hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan sebagai berikut:

“Sangat terbantu” (Ibu Jumiati 61 tahun)

“Sangat terbantu bagi kami yang tidak mampu” (Ibu Patemi 60 tahun)

“Ya... itu ... sangat terbantu untuk makan ada” (Ibu Aisyah 63 tahun)

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana dijelaskan di atas, diketahui bahwa pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Batu Ampar tahun 2021 memenuhi kriteria tepat guna karena telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima dalam hal membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek tepat guna, efektivitas kebijakan pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Batu Ampar tahun 2021 telah berjalan dengan baik.

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Efektivitas kebijakan pemerintah di tingkat kabupaten/kota dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Program BPNT khususnya di Kelurahan Batu Ampar tahun 2021 dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap data mengenai seberapa tepat implementasi 5 (lima) aspek kebijakan tersebut, yaitu aspek tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat guna.

Hasil analisis data pada masing-masing dari 5 (lima) aspek kebijakan pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Batu Ampar menunjukkan fakta bahwa pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Batu Ampar sudah memenuhi kriteria kesesuaian antara apa yang direncanakan dengan apa yang terrealisasi dalam 5 (lima) aspek yang diamati.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Batu Ampar tahun 2021 termasuk dalam kategori tinggi karena terdapat empat dari lima aspek tepat yang menjadi fokus penelitian dinilai dan diakui sudah tepat baik oleh pemerintah sebagai pelaksana program maupun oleh masyarakat sebagai penerima manfaat program BPNT, sementara hanya ada satu aspek dinilai belum sepenuhnya tepat.

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini merekomendasikan dua hal sebagai berikut. (i) Mengingat program BNPT dan program bantuan sejenis sangat dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh mesyarakat penerima, maka seyogyanya program ini dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. (ii) Pelaksanaan program BPNT dan/atau program sejenisnya di masa yang akan datang haruslah terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan program baik pada sisi kebijakan maupun pada sisi teknis implementasi di lapangan untuk memastikan bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat guna. Kedua rekomendasi ini dinilai sangat penting agar pelaksanaan program terhindar dari praktek penyimpangan dan penyalahgunaan yang pada akhirnya akan mengganggu citra pemerintah sebagai pelaksana program dan merugikan masyarakat penerima bantuan.

Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, S. (2017). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.477>
- Dimock & Dimock dalam Tachjan. (2006) *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI.
- Grindle dalam Tachjan, (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI.
- Haerul, & Akib, Haedar, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2477>
- Husain, L., Amirullah, A. H., & Saleh, S. (2015). *Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kearsipan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Ad'ministrare*, 2(1), 46–52.
- Lestari, E. R. (2017). Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Pилanju di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Eka*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Mamuaja, B. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), 165–171. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11583>
- Pemkot Balikpapan. 2021. Laporan Kegiatan Profil Kelurahan Batu Ampar Tahun 2021 Kecamatan Balikpapan Utara.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan* Suaib, M. R.

(2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.

Wahyudi, E. (2020). Kata kunci : Implementasi kebijakan, Motivasi dan Kinerja Pegawai. *Indept*, 8(3), 2087–9245